

**TINJAUAN TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM DAKWAAN  
DALAM PENUNTUTAN PERKARA ABORSI DAN IMPLIKASI YURIDIS  
TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 42/PID.B/2010/PN.KLT)**



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun Oleh :

**JOHAN HARDIANTO**

**E1106143**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2010**

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Konstitusi Negara adalah hak hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia.

Dalam hukum pidana di Indonesia penghilangan hak hidup itu diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, demikian juga penganiayaan yang dapat menyebabkan matinya orang lain. Disamping itu ada pula ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan (aborsi).

Ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain adanya pemikiran yang mengedepankan hak anak untuk dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia.

Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas

kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk membantu melakukan aborsi adalah tabib, bidan atau juru obat.

Perbuatan aborsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dilarang untuk dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman yang berat. Tetapi walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat diketahui dari data-data tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia.

Data yang komprehensif tentang kejadian aborsi di Indonesia tidak tersedia. Berbagai data yang diungkapkan adalah berdasarkan survei dengan cakupan yang relatif terbatas. Penelitian yang dilakukan *Population Council* mengemukakan jumlah kasus aborsi di Indonesia pada tahun 1989 diperkirakan berkisar antara 750.000 sampai 1.000.000. Hal ini berarti terjadi sekitar 18 aborsi per 100 kehamilan. Paulinus Soge juga menulis berdasarkan hasil diskusi terbatas mengenai *abortus provocatus* tidak aman yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tanggal 24 April 1998 di Jakarta, di Indonesia diperkirakan tiap tahun dilakukan sejuta *abortus provocatus* tidak aman. Data yang ditulis oleh Muhamad Faisal dan Sabir Ahmad, diperkirakan dalam setahun di Indonesia terjadi 16,7-22,2 *abortus provocatus* per 100 kelahiran hidup. Menurut Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang mencakup perempuan kawin usia 15-49 tahun menemukan bahwa tingkat aborsi pada tahun 1997 diperkirakan 12 persen dari seluruh kehamilan yang terjadi. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil analisa data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002-2003, yang menunjukkan bahwa 7,2 persen kelahiran tidak diinginkan (SDKI, 2002).

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan kejahatan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara untuk

melakukan penuntutan dari segala perbuatan yang termasuk tindak pidana dan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan didalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan definisi penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu kasus atau perkara pidana yang menyimpang dalam masyarakat.

Penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan merupakan salah satu langkah penting untuk menjerat pelaku tindak pidana aborsi yang kemudian ditempuh dalam proses pembuktian di pengadilan. Dalam bidang penuntutan yang diatur adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu, baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum. Untuk mengungkap materi bidang penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak menoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan atau penyidikan tambahan (Suharto, 2004:4). Sehingga apabila tuntutan yang dibuat penuntut umum tidak sesuai atau terjadi kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Oleh karena itu penuntut umum harus hati-hati, cermat, dan jelas dalam pelaksanaan penuntutan.

Penulis tertarik untuk mengkaji kasus perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT karena penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang mahasiswi di Klaten mengabaikan unsur keadilan dengan mengajukan tuntutan pidana yang sangat ringan. Padahal dalam faktanya telah terbukti tindak pidana aborsi dilakukan terdakwa adalah dengan sengaja menyuruh orang menggugurkan

atau mematikan kandungan yang mengakibatkan matinya janin yang berusia 24 minggu. Dalam upaya penegakan hukum terdapat tiga unsur yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*) harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang (Sudikno Mertokusumo, 1991:134-135).

Meskipun ada pandangan keadilan pada kasus aborsi berkaitan dengan persamaan kedudukan di muka hukum bagi orang-orang yang diduga bersalah telah melakukan kejahatan tersebut. Jika terdakwa yang diadili adalah orang yang melakukan aborsi tersebut, tentu akan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku aborsi. Sebab dalam kasus aborsi, niat untuk mengugurkan kandungan dapat berasal dari wanita hamil yang bersangkutan. Hanya saja untuk merealisasi niatnya tersebut, ia membutuhkan bantuan orang lain, misalnya paramedis atau dukun beranak. Tetapi sisi lain, tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan hak hidup seseorang dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Dalam hukum pidana di Indonesia perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Hukum tentang aborsi sendiri sampai saat ini masih menjadi perdebatan di masyarakat, meskipun Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haram untuk aborsi kecuali pada kondisi-kondisi tertentu dan sudah adanya peraturan yang melarang tindakan aborsi tersebut. Sumpah dokter menyatakan bahwa dokter akan menghargai hidup insani sejak mulai awal pembentukan, tetapi sikap kalangan profesi dokter terhadap aborsi juga belum seragam. Dalam konteks hukum pidana, terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Padahal peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hal yang sama. Terdapat dua perbedaan yang sangat tajam antara kedua aturan tersebut, pertama KUHP mengenal larangan aborsi tanpa kecuali, tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan justru memperbolehkan terjadi aborsi dengan alasan medis. Kedua, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

1992 tentang Kesehatan mengenai ketentuan pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang tidak memenuhi indikasi medis sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kesehatan tersebut jauh lebih berat daripada ancaman pidana terhadap perbuatan yang sama dalam KUHP.

Kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan para penegak hukum masih menemui kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia. Banyak pelaku aborsi di Indonesia yang lolos dari jeratan hukum karena tidak didukung bukti-bukti permulaan yang cukup. Realitas seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak yang nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara riil dapat diketahui akibatnya. Aborsi baik proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi.

Menghadapi kasus aborsi tersebut menjadi sebuah keharusan bagi jaksa mempelajari dan mendalami serta menghayati peraturan perundang-undangan hukum pidana materiil, baik yang dimuat dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana yang dimuat di luar KUHP. Selanjutnya, jaksa harus mempelajari dan membuat suatu konstruksi hukum yang dituangkan dalam surat dakwaan untuk menjerat dan kemudian menuntut perbuatan aborsi tersebut. Dengan ini, diharapkan penuntutan berhasil dilakukan dalam persidangan. Selain itu, dapat mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari kasus atau perkara pidana aborsi, terutama keadilan yang diterima oleh orang yang melakukan aborsi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana konstruksi hukum dakwaan yang dibuat penuntut umum dalam penuntutan perkara aborsi serta implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana?

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam perspektif yuridis mengenai konstruksi hukum dakwaan dalam penuntutan perkara aborsi beserta akibat hukum terhadap

penjatuhan sanksi pidana. Oleh karena itu, penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul :

**“TINJAUAN TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM DAKWAAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA ABORSI DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 42/PID.B/2010/PN.KLN)”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk mengetahui masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat di mana terdapat pembatasan objek kajian yang akan diteliti, maka perlu adanya perumusan masalah yang tersusun secara sistematis dan baik. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam penuntutan perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT?
2. Apakah implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana sebagai akibat konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum berkenaan dengan penuntutan perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan penelitian yang jelas dan sudah pasti, sebagai sasaran yang akan dicapai untuk pemecahan masalah yang di hadapi. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penulisan hukum ini adalah :

### 1. Tujuan Objektif

- a. Mendeskripsikan konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam penuntutan perkara aborsi.
- b. Mendeskripsikan bagaimana implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana dari konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum berkenaan dengan penuntutan perkara aborsi.

### 2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data yang cukup dan relevan yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis serta penambahan aspek hukum didalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
- c. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penulisan hukum penulis.

## **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah konstruksi hukum dakwaan dalam penuntutan perkara aborsi dan implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana serta dapat menambah bahan-bahan kepastakaan.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.



- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Dengan demikian masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun metode atau teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu penampilan yang sistematis menyangkut putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT berkenaan dengan tindak pidana aborsi, kemudian meneliti konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam penuntutan perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT yang akan melahirkan implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana sebagai akibat dari konstruksi hukum dakwaan yang disusun tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang keilmuan hukumnya bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). Sifat preskriptif ini merupakan hal substansial yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum.

## 3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93).

Dari kelima pendekatan penelitian hukum tersebut, yang relevan dengan penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Yang dimaksud pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

## 4. Sumber Penelitian Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder, yang berupa :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud

Marzuki, 2006:141). Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya:

- 1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum sekunder yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Peneliti menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT berkenaan dengan tindak pidana aborsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Peneliti juga mendokumentasikan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Teknik Analisis

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Di dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis.

Dalam penelitian ini, konstruksi hukum dalam penuntutan perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam penuntutan perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT beserta implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Marzuki, 2006: 47).

## F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab kedua memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam sub bab kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan tentang surat dakwaan, penuntut umum dan penuntutan serta tindak pidana aborsi. Sub bab kedua menguraikan kerangka pemikiran.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam penuntutan perkara aborsi Nomor: 42/PID.B/2010/PN.KLT dan implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana sebagai akibat konstruksi hukum yang dibuat oleh penuntut umum berkenaan dengan penuntutan perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab III dan juga berisi saran-saran penulis sehubungan dengan hasil penelitian yang telah didapat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kerangka Teori**

#### **1. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan**

##### **a. Pengertian Surat Dakwaan**

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2002:376).

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu (Andi Hamzah, 2008:167).

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan (Harun M. Husein dan Hamrat Hamid, 1994:43).

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik inti persamaannya sebagai berikut :

- 1) Sebagai suatu akta, dalam surat dakwaan harus dicantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya. Tanpa mencantumkan tanggal dan tanda tangan tersebut, surat dakwaan tidak bernilai sebagai suatu akta, meskipun masih dapat disebut sebagai surat.
- 2) Surat dakwaan harus diuraikan tindak pidana apa yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Perumusan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan dengan cermat, jelas, dan lengkap dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana yang bersangkutan.

- 4) Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### **b. Fungsi Surat Dakwaan**

Pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam surat dakwaan.

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan (M. Yahya Harahap, 2002:378).

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut :

##### **1) Bagi Penuntut Umum**

Sebagai dasar penuntut terhadap terdakwa, dasar pembuktian kesalahan terdakwa, dan sebagai dasar pembahasan yuridis, dan tuntutan pidana.

##### **2) Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum**

Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan (pledoi), dasar menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap terdakwa penuntut umum (alibi), dasar pembahasan yuridis, dan dasar untuk melakukan upaya hukum.

##### **3) Bagi Hakim**

Sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan, dasar keputusan yang akan dijatuhkan, dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.

Dari pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana seperti disebutkan di atas, maka sesungguhnya bahwa tujuan utama dari suatu surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat

ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu tindak pidana. Untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukannya itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya.

### c. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu :

#### 1) Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi :

- a) Diberi tanggal,
- b) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- c) Ditandatangani oleh penuntut umum.

#### 2) Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut:

##### a) Cermat

Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan.



## b) Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain atau antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

## c) Lengkap

Lengkap berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

**d. Bentuk Surat Dakwaan**

KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan yang dikenal sekarang ini adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan.

Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

## 1) Dakwaan Tunggal

Penyusunan surat dakwaan ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan ini sangat mengandung resiko karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam persidangan maka tidak ada alternatif lain kecuali terdakwa dibebaskan. Dalam praktek kadang-kadang ditemui suatu keadaan perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang ada sulit dicari alasan untuk mendakwa secara tunggal. Penyusunan surat dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan surat dakwaan lain, karena penuntut umum hanya

memfokuskan pada sebuah permasalahan saja. Hal ini berarti bahwa penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

## 2) Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

## 3) Dakwaan Subsidiar

Susunan dakwaan subsidiar ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan yang parallel atau satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda tentang berat ringan ancaman pidananya. Dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana teringan. Pembuktian dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan terbawah.

#### 4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk surat dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

#### 5) Dakwaan Kombinasi atau Gabungan

Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair atau antara dakwaan komulatif dengan dakwaan subsidair atau antara dakwaan komulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

## 2. Tinjauan Tentang Penuntut Umum dan Penuntutan

### a. Pengertian Penuntut Umum dan Penuntutan

KUHAP memberikan uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6a dan b. Ditegaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP).

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6a jo Pasal 13 KUHAP).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum menurut Pasal 1 angka 2 adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

#### **b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum dalam Proses Perkara Pidana**

Seiring perkembangan jaman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1991 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk

lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Maka dari itulah pembaharuan undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia perlu dilakukan dengan membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas dan wewenang kejaksaan bidang pidana adalah:

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 5) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Sedangkan dalam Pasal 14 KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” antara lain ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Disamping tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana yang tersebut dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatas, pada Pasal 32 juga disebutkan bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Selain itu Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya, sesuai dengan bunyi Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### 3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “delik” berasal dari bahasa latin “*delictum*” atau “*delicta*”, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Para Sarjana Hukum Indonesia menterjemahkan *strafbaar feit* itu sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, perbuatan yang melawan hukum.

“*Straafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Untuk lebih jelasnya dalam hal ini penulis mengutip beberapa pendapat para ahli hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana, sebagai berikut :

##### 1) Moeljatno

Memberikan batasan mengenai syarat-syarat suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### a) Unsur perbuatan

- (1) Dilarang dan ancaman pidana.
- (2) Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).
- (3) Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materiil).

##### b) Unsur pembuat, yaitu :

- (1) Adanya kesalahan.
- (2) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).
- (3) Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru.

##### 2) Simons

Merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simons juga mengatakan bahwa di dalam beberapa rumusan

delik dapat dijumpai suatu persyaratan berupa keadaan-keadaan tertentu yang harus timbul setelah sesuatu tindakan itu dilakukan oleh orang, di mana timbulnya keadaan-keadaan semacam itu bersifat menentukan agar tindakan orang tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang dapat dihukum.

### 3) Hezewinkel-Suringa

Membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

### 4) Pompe

Berpendapat bahwa perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Selanjutnya juga mengatakan bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

### 5) Van Hattum

Tindak pidana atau *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa untuk menjatuhkan hukuman tidak cukup bila disitu hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan juga harus ada *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, yang mana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan itu tidak bersifat



*wederrechtelijk* (melawan hukum) yang telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja (P. A. F. Lamintang, 1997:181-184).

Pada dasarnya suatu tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

a) Unsur perbuatan/tindakan atau tingkah laku.

Tindak pidana merupakan larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan tingkah laku harus disebutkan di dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana tanpa mencantumkan unsur tingkah laku, maka cara perumusannya adalah suatu perkecualian belaka dengan alasan tertentu, dan tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan, unsur itu telah ada dengan sendirinya di dalamnya dan wujudnya tetap harus dibuktikan dengan sidang pengadilan.

b) Unsur bersifat melawan hukum.

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya suatu perbuatan, yang dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil). Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum.

c) Unsur kesalahan.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, oleh karena itu unsur kesalahan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d) Unsur kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orangnya dan tidak pada perbuatan yang sebenarnya. Kemampuan bertanggungjawab merupakan syarat untuk dapat dipidanya pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan bukan merupakan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana.

e) Unsur memenuhi rumusan undang-undang.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP, "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan". Ilmu hukum merupakan ilmu sosial yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat sehingga suatu perbuatan pidana terkadang lebih cepat ada dan berkembang dibandingkan dengan perundang-undangan. Sehingga perlu adanya kebijaksanaan hakim untuk bertindak dan hakim mempunyai fungsi untuk membuat hukum.

**b. Pengertian Aborsi**

Kata *abortion* dalam *Blaks's Law Dictionary*, yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or articially induced expulsion of an embrio or featus. As used in illegal context refers to induced abortion.* Keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

*Abortus provocatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, yang artinya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Berbeda dengan *abortus spontaneous* yaitu kandungan seorang wanita hamil yang gugur secara spontan. Untuk itu perlu dibedakan antara pengguguran kandungan dan keguguran. Pengguguran kandungan dilakukan dengan sengaja, sedangkan keguguran terjadi tidak disengaja. Untuk menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang sering digunakan sekarang adalah aborsi (K. Bertens, 2002:1).

*Abortus provocatus* meliputi *Abortus provocatus medicalis*, yaitu penghentian kehamilan (*terminasi*) yang disengaja karena alasan medis. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat dipertanggung-jawabkan, dan dibenarkan oleh hukum dan *abortus provocatus criminalis*, yaitu penghentian kehamilan atau pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran (Dadang Hawari, 2006:62).

Aborsi adalah sebuah kata yang diserap dari bahasa Inggris *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan. Atau disebutkan juga bahwa aborsi adalah lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan versi lain menyebutkan aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama kehamilan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. Menurut perspektif medis aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.

### **c. Kejahatan Terhadap Nyawa**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama dari hukum pidana positif Indonesia, yang didalamnya mengatur tentang aturan umum hukum pidana (Buku I) dan rumusan-rumusan tindak pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran (Buku II dan III). Tindak pidana adalah ketentuan berupa rumusan tentang perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai

ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.

Dari sudut obyek kejahatan, tindak pidana-tindak pidana dalam KUHP dapat dibedakan menjadi kelompok kejahatan terhadap harta benda dan yang berhubungan dengan benda-benda (keadaan) sebagai obyek hukum, serta tindak pidana terhadap nyawa dan yang berhubungan dengan subyek hukum (orang dan badan). Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa ini termasuk pada kelompok yang disebutkan kedua. Sebagian kejahatan yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang. Hampir setiap hari kita membaca di koran maupun berita media elektronik tentang terjadinya perbuatan-perbuatan penyerangan terhadap tubuh dan nyawa, baik dilakukan oleh pribadi maupun kelompok orang-orang bahkan sebagian telah berubah menjadi anarkhis (Adami Chazawi, 2001:54).

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan juga yang merapakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dikelompokkan atas dua dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa).

1) Atas dasar kesalahan

- a) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338-350 KUHP.
- b) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan kealpaan, dimuat dalam Bab XXI KUHP (khusus Pasal 359 KUHP).

2) Atas dasar obyeknya

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHP.
- b) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHP.

- c) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 KUHP (Adami Chazawi, 2001:55).

**d. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Aborsi**

Ketentuan mengenai tindak pidana aborsi dapat dijumpai dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya Pasal 299), Bab XIX Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346-349 KUHP). Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut (menurut KUHP terjemahan Moeljatno) :

**Pasal 299**

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

**Pasal 346**

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

**Pasal 347**

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### Pasal 349

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Jika menelaah pasal-pasal tersebut di atas, tampaknya KUHP tidak membolehkan terjadinya suatu aborsi di Indonesia. KUHP tidak melegalkan aborsi tanpa kecuali, yaitu terhadap aborsi yang dilakukan berdasarkan alasan atau pertimbangan medis (*abortus provocatus medicinalis*) atau aborsi yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku (*abortus provocatus criminalis*) pun dilarang. Kalau dicermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subyek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hal ini jelas, bahwa Indonesia mengikuti perundang-undangan aborsi tersebut (Pasal 299, 346-349 KUHP) tersebut, yang menurut perundang-undangan tidak memperkenankan aborsi dan yang karenanya dapat dikatakan bersifat "ilegal". Selaku demikian, seolah-olah ia tidak memberikan kemungkinan bagi suatu pengecualian, dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak memperkenankan melakukan aborsi, juga yang berdasarkan atas pertimbangan medis dan yang disebut dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Perbuatan dalam Pasal 299 KUHP merupakan perbuatan yang mirip dengan *abortus*, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu

kandungan yang hidup, bahkan tidak perlu bahwa benar-benar telah ada seorang perempuan yang hamil. Hanya apabila pada seorang perempuan ditimbulkan harapan bahwa kehamilan yang mungkin ada akan dihentikan dengan pengobatan ini. Dengan demikian Pasal 299 sangat bersifat preventif untuk dapat lebih efektif memberantas *abortus* (Wirjono Prodjodikoro, 2002:74).

Seseorang dikatakan telah lakukan kejahatan aborsi, apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 346 KUHP tersebut. Unsur pertama tindak pidana aborsi yang diatur dalam Pasal 346 KUHP ialah unsur “wanita atau orang lain yang disuruh lakukan untuk itu” (subjek tindak pidana). Dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang jelas tentang hal ini, namun wanita hamil dapat diartikan yang sel telurnya telah dibuahi oleh sel sperma sehingga tidak mengalami menstruasi hingga melahirkan kandungannya atau dengan kata lain wanita hamil adalah wanita yang dikandungnya terdapat janin dari hari pertama setelah pembuahan sampai melahirkan. Sedangkan orang yang disuruh lakukan untuk itu adalah orang yang dengan persetujuan wanita hamil tersebut melakukan tindak pidana aborsi, misalnya : dokter, bidan, juru obat, dukun, atau orang yang mempunyai kemampuan untuk itu. (Lukman Hakim Nainggolan. 2006. Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-Undangan di Indonesia. JURNAL EQUALITY, Vol. 11, No. 2).

Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus aborsi, minimal ada dua orang yang terkena ancaman pidana, yakni si perempuan sendiri yang hamil serta barangsiapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil dapat terkena ancaman pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman pidana kalau ia minta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khusus untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan Pasal 347 dan 348 KUHP. Persoalannya adalah bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjerakan dan meminimalisasikan para pelaku kejahatan aborsi tersebut.

Perkembangan peraturan mengenai tindak pidana aborsi dapat dijumpai dalam Pasal 15 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan Pasal 346-349 KUHP diatur soal aborsi yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (*abortus provocatus criminalis*), maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diatur tentang aborsi yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis atau (*abortus provocatus medicinalis*).

Aborsi yang terjadi karena adanya kelainan-kelainan yang dialami oleh perempuan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksinya (aborsi spontan). Jenis aborsi ini dari perspektif hak asasi manusia maupun dari perspektif hukum sama sekali tidak menimbulkan permasalahan yaitu jika dengan alasan medis, dengan persetujuan keluarga, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang itu. Permasalahan akan muncul apabila menyangkut *abortus provocatus* yaitu terjadinya aborsi yang dilakukan dengan sengaja. Seorang perempuan terpaksa harus melakukan aborsi karena keputusan medis. Pengakhiran kehamilan harus dilakukan karena alasan bahwa kehamilan yang terjadi membahayakan ibunya atau alasan kondisi janin cacat (*abortus provocatus terapeuticus*).

Perundang-undangan telah memperkenalkan pengecualian terhadap pengguguran kandungan:

Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
  - a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.



- b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
  - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 80

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

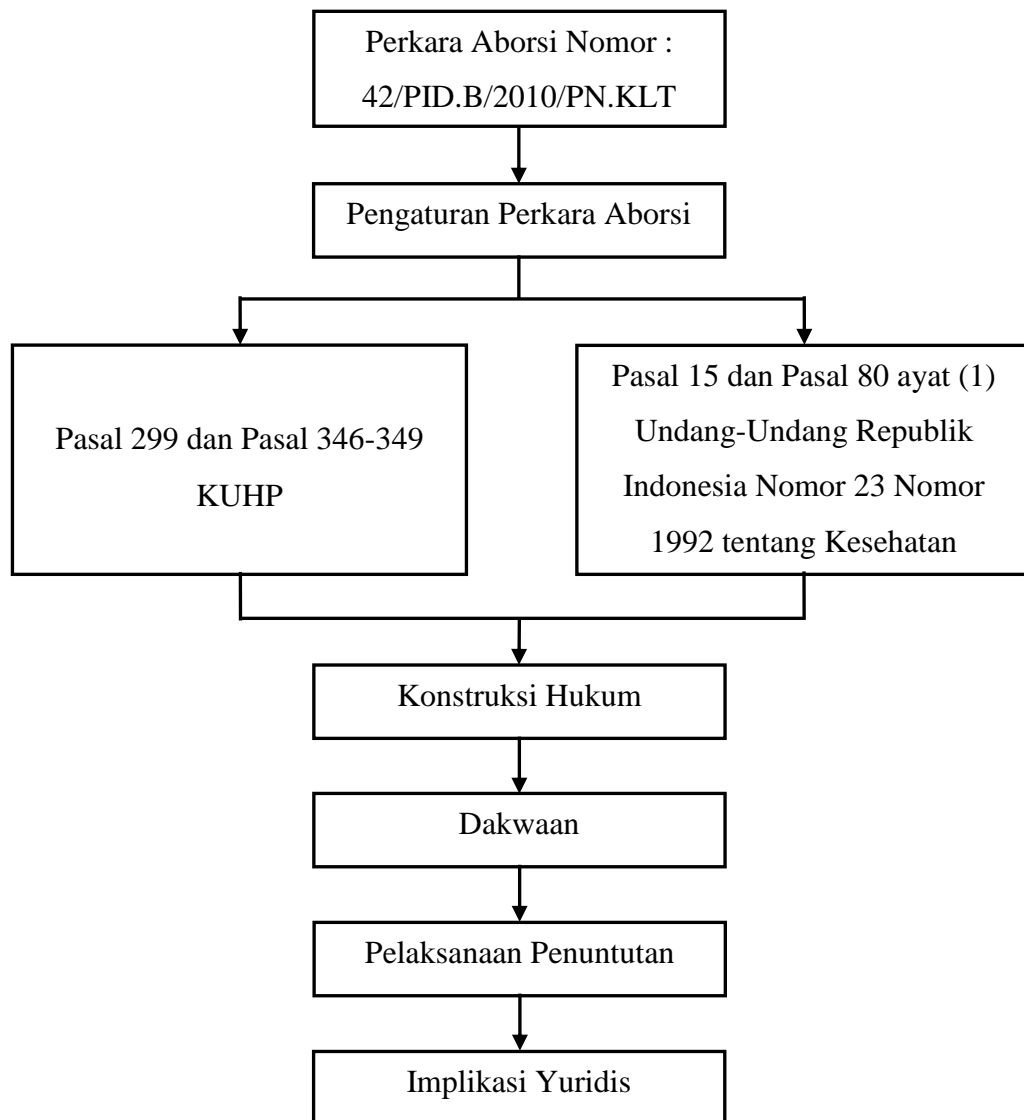
Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Hal tersebut berarti bahwa apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Berdasarkan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tindakan medis (aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli (Hesti Armiwulan, 2001).

Adapun penjelasan dari ayat pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tersebut menyatakan “tindakan medis tertentu dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu hamil dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Melihat

rumusan ayat (1) Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan beserta penjelasannya di atas, tampaklah bahwa pada dasarnya undang-undang tersebut juga menganut *abortus provocatus criminalis*, kecuali untuk jenis *abortus provocatus therapeuticus*. Terlihat kalau pengaturan aborsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga teramat limitatif, sebab berdasarkan uraian di atas, *abortus provocatus medicinalis* hanya dapat dilakukan jika nyawa ibu terancam bahaya maut. Diluar itu, pertolongan aborsi dikategorikan sebagai tindak melawan hukum.

## B. Kerangka Pemikiran

### 1. Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran

### 2. Keterangan

Berdasarkan bagan kerangka pemikiran di atas, dapat dijabarkan bahwa tindak pidana aborsi diatur secara umum dalam Pasal 299 dan Pasal 346-349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kedua undang-undang tersebut merupakan

dasar pertimbangan jaksa dalam membuat konstruksi hukum sebuah surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap tindak pidana aborsi. Dalam pembuatan konstruksi hukum sebuah surat dakwaan dan surat tuntutan, jaksa harus mempelajari dan mendalami serta menghayati peraturan perundang-undangan hukum baik yang dimuat dalam KUHP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Nomor 1992 tentang Kesehatan untuk menjerat perbuatan aborsi tersebut. Hal ini, bertujuan agar penuntutan berhasil dilakukan dalam persidangan dan dapat mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari kasus atau perkara pidana aborsi. Disamping itu, jaksa juga harus mengetahui dan menghadapi implikasi yuridis apa saja yang ditimbulkan dari pembuatan konstruksi hukum sebuah surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut.

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konstruksi Hukum Dakwaan yang Disusun Oleh Penuntut Umum dalam Penuntutan Perkara Aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT**

Pada bab ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu kasus posisi dalam perkara Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT untuk selanjutnya diuraikan dalam konstruksi hukum yang diterapkan oleh penuntut umum. Adapun kasus posisi, konstruksi hukum surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum adalah sebagai berikut :

##### **1. Kasus Posisi**

Tindak pidana aborsi dilakukan dengan sengaja oleh seorang mahasiswa Stikes Muhammadiyah Klaten dengan cara menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya. Terdakwa bernama Yunita Endah Setyowati, bertempat tinggal di Dukuh Semanding Rt. 01 Rw. 01, Desa Sendangrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Perbuatan aborsi ini dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010, di rumah kos di Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Aborsi dilakukan bermula karena Awalnya karena kandungannya semakin membesar dengan usia kandungan 24 minggu dan laki-laki yang telah menghamilinya tidak bertanggung jawab pergi meninggalkan dirinya. Terdakwa menjadi bingung dan malu apabila masalah kehamilan itu diketahui orangtua dan orang lain, ditambah lagi terdakwa masih harus menyelesaikan kuliah, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang dikandungnya. Selanjutnya untuk melancarkan niatnya, terdakwa terlebih dahulu mencari seseorang yang dapat menolong dirinya baik memberikan informasi tentang orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan atau orang yang secara langsung dapat menggugurkan kandungannya.

Usaha yang dilakukan terdakwa untuk mencari seseorang yang dapat membantu menggugurkan kandungan membuahkan hasil. Sewaktu ketika, saat terdakwa berada di Kampus Stikes Muhammadiyah Klaten, terdakwa didatangi

petugas kepolisian yaitu Purbo Adi Wibowo yang sedang mencari informasi tentang peredaran narkoba, karena diantara mereka sudah saling mengenal, terdakwa mengutarakan maksudnya untuk dicarikan seseorang yang dapat memberikan informasi tentang orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan. Beberapa hari kemudian Purbo Adi Wibowo menghubungi dan memberitahu terdakwa bahwa telah menemukan seseorang yang dapat membantu keinginan terdakwa, yaitu Muhammad Effendi Fauqi Annas alias Beti. Setelah terdakwa sudah mempunyai uang yang cukup sebagai biaya untuk membayar orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan, mereka bertemu di Green Net di Dukuh Krapyak, Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, dimana saat itu Muhammad Effendi Fauqi Annas alias Beti bersama temannya yang bernama Lekso Sambodo alias Cocok yang kemudian saat itu pula terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 kepada Muhammad Effendi Fauqi Annas alias Beti. Selanjutnya mereka berangkat menuju ke tempat seseorang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan yang diketahuinya bernama Dwi Wahyu Putri di Gang nomor 4 Kampung Ngepos, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Dwi Wahyu Putri adalah bidan di rumah sakit umum pusat (RSUP) dr Soeradji Tirtonegoro Klaten dan ternyata telah membantu melakukan aborsi sebanyak sepuluh kali. Terdakwa disuntik pada paha kanannya dan kemudian terdakwa diminta untuk datang lagi besok siang untuk diberikan obat. Keesokan harinya terdakwa datang sendirian menemui Dwi Wahyu Putri, lalu diberi tiga butir pil Cytotec. Berdasarkan keterangan saksi ahli pil Cytotec tersebut merupakan obat sakit perut, dimana apabila obat tersebut diminum oleh ibu hamil, maka rahim akan berkontraksi dan mulut rahim akan melunak atau membuka dengan demikian akan terjadi keguguran, selanjutnya Dwi Wahyu Putri menjelaskan pula bahwa reaksinya 2 sampai 3 hari lagi dan kalau tidak berhasil gugur agar terdakwa datang kembali. Namun setelah terdakwa meminum pil yang diterimanya ternyata pil tersebut belum bereaksi, sehingga sesuai dengan pesan Dwi Wahyu Putri, terdakwa datang lagi untuk bertemu, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa sempat disuntik dan diberi 3 butir

pil yang sama untuk diminum dan Dwi Wahyu Putri meminta tambahan uang sebesar Rp. 200.000,00 kepada terdakwa dan saat itu pula terdakwa memberikannya. Dwi Wahyu Putri sempat mengatakan kalau tidak gugur lagi agar terdakwa datang kembali dan pengguguran akan dilakukan menggunakan alat dengan biaya Rp 300.000,00, kemudian setelah terdakwa kembali ke tempat kosnya dan menunggu sampai 24 jam kandungan terdakwa gugur, dimana janin yang keluar masih dalam keadaan hidup dan terdengar tangisannya oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa janin tersebut ditaruh di tempat tidur dan beberapa saat kemudian meninggal.

Keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 terdakwa memakamkan janin di Alas Kethu Wonogiri, dengan temannya yang bernama Tulus Nyadi, Sumardi dan Martoyo. Setelah selesai menguburkannya mereka berempat segera pergi ke rumah Martoyo, namun sesampainya di rumah Martoyo mereka disuruh menemui Kepala Dusun Eko dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa ditanya tentang kebenaran telah memakamkan janin di pemakaman umum Alas Kethu dan terdakwa menjawabnya bahwa benar dirinya telah memakamkan janin di pemakaman umum Alas Kethu. Beberapa saat kemudian anggota Polres Wonogiri datang dan mengusutnya.

## **2. Identitas Terdakwa**

N a m a	: YUNITA ENDAH SETYOWATI
Tempat lahir	: Wonogiri
Umur/Tgl lahir	: 20 tahun/17 Juni 1989
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dukuh Semanding Rt/Rw 01/01, Desa Sendangrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SLTA

### 3. Dakwaan

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai surat dakwaan penuntut umum terhadap kasus perkara aborsi Nomor : 42/Pid.B/2010/PN.KLT adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan	Ancaman Pidana	Tindak Pidana
Pertama	Pasal 346 KUHP	Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.
Kedua	Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan :</p> <p>Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.</p> <p>Tindakan medis tertentu hanya dapat dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.</li> <li>- Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.</li> <li>- Dengan persetujuan ibu hamil yang</li> </ul>



		bersangkutan atau suami atau keluarganya.
--	--	---

Berdasarkan paparan susunan dakwaan penuntut umum di atas secara lebih rinci dakwaan yang disusun oleh penuntut umum secara alternatif, yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Terdakwa YUNITA ENDAH SETYOWATI pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010, bertempat di rumah kos terdakwa tepatnya di Ds. Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya karena kandungannya semakin membesar lebih-lebih pacarnya yang bernama ANDHIKA MUHAMMAD SAIFUDIN bin NARTO tidak bertanggung jawab pergi meninggalkan dirinya, terdakwa YUNITA ENDAH SETYOWATI menjadi bingung dan malu bila kehamilannya di luar nikah diketahui oleh teman-temannya maupun oleh orang tuanya sehingga terdakwa mencari jalan pintas untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 24 minggu dan untuk melancarkan niatnya, ia lebih dahulu mencari seseorang yang dapat menolong dirinya baik memberikan informasi tentang orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan atau orang yang secara langsung dapat menggugurkan kandungannya. Sewaktu ketika, saat terdakwa berada di kampus STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN, ia didatangi petugas kepolisian yaitu saksi PURBO ADI WIBOWO yang sedang mencari informasi tentang peredaran narkoba, karena diantara mereka sudah saling mengenal, ia mengutarakan maksudnya untuk dicarikan seseorang yang dapat memberikan informasi tentang orang yang bersedia membantu

menggugurkan kandungan, namun saat itu terdakwa sendiri tidak berterus terang siapa yang hamil dan siapa yang akan menggugurkan kandungan, ia hanya mengakui untuk menolong temannya yang hamil, dan saksi PURBO ADI WIBOWO pun menyanggupinya, karena beberapa hari saksi PURBO ADI WIBOWO tidak memberikan informasi, terdakwa menelepon dan langsung mengakui bahwa yang membutuhkan dan yang akan menggugurkan kandungan adalah diri terdakwa sendiri, selanjutnya setelah terjadi pembicaraan melalui telepon, lalu pada awal bulan Desember 2009 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari saksi PURBO ADI WIBOWO yang saat itu berada di alun-alun Klaten yang intinya telah menemukan seseorang yang dapat membantu keinginan terdakwa yang diakuinya bernama MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI (yang disidangkan tersendiri dalam Berkas Perkara yang lain), lalu terdakwa pun memperkenalkan dirinya dan mengutarakan maksudnya yang kemudian berjanji untuk saling bertemu, kemudian diminta mengantarkan untuk bertemu kepada seseorang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan terdakwa, karena mereka sudah saling berjanji untuk bertemu dan terdakwa sendiri sudah mempunyai uang yang cukup sebagai biaya untuk membayar orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan, mereka pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2009 sekitar pukul 22.00 WIB bertemu di GREEN NET di Dk. Krapyak, Ds. Merbung, Kec. Klaten Selatan, dimana saat itu saksi MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI bersama temannya yang bernama COCOK yang kemudian saat itu pula terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada saksi MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI, selanjutnya mereka pun segera berangkat menuju ke tempat seseorang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan yang selanjutnya diketahuinya bernama DWI WAHYU PUTRI di Gang nomor 4 Kampung Ngepos, Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten (terdakwa yang disidangkan sendiri dalam Berkas Perkara yang lain), dan setelah bertemu terdakwa segera mengutarakan maksudnya sedangkan saksi MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI maupun temannya yang bernama COCOK

menunggu di rumah COCOK yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi DWI WAHYU PUTRI, lalu oleh saksi DWI WAHYU PUTRI terdakwa disuntik pada paha kanannya dan kemudian terdakwa diminta untuk datang lagi besok siang untuk diberikan obat.

Keesokan harinya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa datang sendirian menemui saksi DWI WAHYU PUTRI, lalu diberi 3 buah butir pil untuk diminum yang kemudian dapat diketahui berupa pil cytotec yang berdasarkan keterangan saksi ahli pil tersebut merupakan obat sakit perut, dimana apabila obat tersebut diminum oleh ibu hamil, maka rahim akan berkontraksi dan mulut rahim akan melunak/membuka dengan demikian akan terjadi keguguran, selanjutnya oleh saksi DWI WAHYU PUTRI menjelaskan pula bahwa reaksinya 2 sampai 3 hari lagi dan kalau tidak berhasil gugur agar terdakwa datang kembali, namun setelah terdakwa meminum pil yang diterimanya ternyata pil tersebut belum bereaksi, sehingga sesuai dengan pesan saksi DWI WAHYU PUTRI, terdakwa datang lagi untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekira jam 19.00 WIB, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa sempat disuntik dan diberi 3 buah butir pil yang sama untuk diminum, lalu saksi DWI WAHYU PUTRI sempat menjelaskan kalau reaksinya 2 sampai 3 hari lagi bahkan meminta tambahan uang Rp. 200.000,- kepada terdakwa dan saat itu pula terdakwa memberikannya, yang kemudian saksi DWI WAHYU PUTRI sempat mengatakan kalau tidak gugur lagi kesini lagi nanti pakai alat dengan biaya Rp 300.000,-, kemudian setelah terdakwa kembali ke tempat kosnya dan menunggu sampai 24 jam yaitu hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 18.30 WIB kandungan terdakwa gugur, dimana janin yang keluar masih dalam keadaan hidup dan terdengar tangisannya oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa janin tersebut ditaruh di tempat tidur dan terdakwa sempat mengambil gunting dengan maksud untuk memotong tali pusarnya dan diikatnya dengan karet gelang sebab ari-arinya belum keluar. Karena ari-arinya belum keluar terdakwa meremas-remas perutnya sendiri dengan maksud agar ari-arinya dapat keluar, karena selama 10

menit ari-ari tersebut juga tidak keluar terdakwa menelpon saksi DWI WAHYU PUTRI dengan mengatakan bahwa kandungannya telah gugur dan ari-arinya belum keluar, lalu dijawab oleh saksi DWI WAHYU PUTRI agar terdakwa menunggu nanti ari-arinya akan keluar sendiri, setelah terdakwa menunggu sampai 5 menit ari-ari juga belum keluar, terdakwa menelpon kembali saksi DWI WAHYU PUTRI dengan mengatakan bahwa ari-arinya belum keluar, tetapi saksi DWI WAHYU PUTRI menjawabnya dan meminta terdakwa agar menemui di rumah sakit Tegalyoso karena sedang piket, belum sempat terdakwa pergi menemui saksi DWI WAHYU PUTRI di rumah sakit, janin yang semula diletakkan di tempat tidur telah meninggal dunia dan terdakwa membungkus janin tersebut dengan kaos dan ditaruhnya kembali di tempat tidur, dan terdakwa segera meninggalkannya untuk pergi ke RSU Tegalyoso tempat saksi DWI WAHYU PUTRI bertugas, kemudian oleh saksi DWI WAHYU PUTRI ari-ari tersebut berhasil dikeluarkan, selanjutnya setelah ari-ari berhasil dikeluarkan terdakwa sempat menelpon saksi MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI dengan mengatakan kalau kandungannya sudah keguguran sekitar jam 18.30 WIB dalam keadaan hidup namun setelah itu mati, selanjutnya terdakwa pun sempat meminta tolong untuk membantunya agar mengubur janinnya, namun saksi MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI tidak menyanggupinya.

Sepulang dari rumah sakit terdakwa langsung memasukkan ari-ari ke dalam plastik dan dibungkus kaos menjadi satu dengan janin yang sudah terbungkus, kemudian terdakwa menaruhnya di dalam kardus dan diletakkan di tumpukkan busa, keesokan harinya hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekitar jam 06.00 WIB, terdakwa menelpon temannya yang bernama TULUS NYADI dengan maksud agar mau membantu mencarikan tempat pemakaman janinnya, tetapi dijawab oleh temannya yang bernama TULUS NYADI agar terdakwa menunggu kabar berikutnya nanti akan ditelepon kembali, selanjutnya 1 jam kemudian terdakwa mendapat jawaban telepon bahwa ada tempat untuk memakamkan janin di Alas Kethu Wonogiri, selanjutnya atas jawaban tersebut terdakwa berjanji untuk bertemu di Alas Kethu, selanjutnya terdakwa segera

mengambil janinnya yang sudah meninggal dan dimasukkan ke dalam kardus yang kemudian dibawa oleh terdakwa dengan sepeda motor menuju ke Alas Kethu, dan setelah bertemu dengan temannya yang bernama TULUS NYADI yang saat itu bersama dengan 2 orang laki-laki yang masing-masing baru diketahuinya bernama SUMARDI dan MARTOYO, selanjutnya mereka segera pergi ke pemakaman umum yang berada di sekitar Alas Kethu untuk menguburkan janin terdakwa, setelah selesai menguburkannya mereka berempat segera pergi ke rumah MARTOYO, namun sesampainya di rumah MARTOYO mereka disuruh menemui Kadus EKO dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa ditanya tentang kebenaran telah memakamkan janin di pemakaman umum Alas Kethu dan terdakwa menjawabnya bahwa benar dirinya telah memakamkan janin di pemakaman umum Alas Kethu, namun beberapa saat kemudian beberapa anggota Polres Wonogiri datang dan mengusutnya dan setelah dimintai keterangan bahwa terdakwa telah mengakui dan membenarkan bahwa yang dikubur di pemakaman umum Alas Kethu adalah janin yang gugur dari hasil pengguguran kandungan, hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440 / 57 / 01 / 10 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hidayati dari Puskesmas Wonogiri II dengan hasil pemeriksaan keadaan mayat kaku, kepala tak ada kelainan, panjang badan 30 cm, berat  $\pm$  500 gram, anggota gerak atas dan bawah tak ada kelainan, alat kelamin laki-laki, dengan kesimpulan janin diperkirakan dalam usia kehamilan  $\pm$  24 minggu dan Visum Et Repertum No. YM.01.01 I 2010 661.16 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puska P,A, Sp OG dari RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten bahwa YUNITA ENDAH SETYOWATI dengan hasil pemeriksaan vulva/urethva tenang, serviks lunak, ove terbuka darah (+), corpus uteri membesar sekepala bayi, antefleksi parametrium kanan-kiri lemas dengan kesimpulan kelainan tersebut kemungkinan disebabkan akibat proses persalinan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 346 KUHP.

**ATAU**

## KEDUA

Terdakwa YUNITA ENDAH SETYOWATI secara bersama-sama dan bersekutu dengan DWI WAHYU PUTRI (yang disidangkan tersendiri dalam Berkas Perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan, dimana bagi terdakwa adalah merupakan yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya setelah terdakwa dapat menemukan orang yang dapat menghubungkan seseorang yang dapat membantu menggugurkan kandungan yaitu saksi MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI (yang disidangkan tersendiri dalam Berkas Perkara lain) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2009 sekitar pukul 22.00 WIB, dimana saat itu saksi MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI bersama temannya yaitu COCOK dan setelah terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada saksi MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI, mereka bertiga segera berangkat menuju ke tempat orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan terdakwa di daerah Kampung Ngepos, Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah, yang kemudian orang tersebut diketahuinya bernama DWI WAHYU PUTRI (disidangkan tersendiri dalam Berkas Perkara lain), setelah mereka bertemu, saksi MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI bersama temannya segera keluar menunggu di rumah COCOK yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi DWI WAHYU PUTRI, selanjutnya terdakwa segera mengutarakan maksudnya dan menyuruh saksi DWI WAHYU PUTRI untuk bersedia membantu menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 24 minggu, setelah saksi DWI WAHYU PUTRI menyetujuinya, selanjutnya terdakwa disuntik pada paha kanannya dan kemudian diminta untuk datang lagi besok siang untuk diberikan obat.

Keesokan harinya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa datang sendirian menemui saksi DWI WAHYU PUTRI, lalu diberi 3 buah butir pil untuk diminum yang kemudian dapat diketahui berupa pil cytotec yang berdasarkan

keterangan saksi ahli pil tersebut merupakan obat sakit perut, dimana apabila obat tersebut diminum oleh ibu hamil, maka rahim akan berkontraksi dan mulut rahim akan melunak/membuka dengan demikian akan terjadi keguguran, selanjutnya oleh saksi DWI WAHYU PUTRI menjelaskan pula bahwa reaksinya 2 sampai 3 hari lagi dan kalau tidak berhasil gugur agar terdakwa datang kembali, namun setelah terdakwa meminum pil yang diterimanya ternyata pil tersebut belum bereaksi, sehingga sesuai dengan pesan saksi DWI WAHYU PUTRI, terdakwa datang lagi untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekira jam 19.00 WIB, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa sempat disuntik dan diberi 3 buah butir pil yang sama untuk diminum, lalu saksi DWI WAHYU PUTRI sempat menjelaskan kalau reaksinya 2 sampai 3 hari lagi bahkan meminta tambahan uang Rp. 200.000,- kepada terdakwa dan saat itu pula terdakwa memberikannya, yang kemudian saksi DWI WAHYU PUTRI sempat mengatakan kalau tidak gugur lagi kesini lagi nanti pakai alat dengan biaya Rp 300.000,-, kemudian setelah terdakwa kembali ke tempat kosnya dan menunggu sampai 24 jam yaitu hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 18.30 WIB kandungan terdakwa gugur, dimana janin yang keluar masih dalam keadaan hidup dan terdengar tangisannya oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa janin tersebut ditaruh di tempat tidur dan terdakwa sempat mengambil gunting dengan maksud untuk memotong tali pusarnya dan diikatnya dengan karet gelang sebab ari-arinya belum keluar. Karena ari-arinya belum keluar terdakwa meremas-remas perutnya sendiri dengan maksud agar ari-arinya dapat keluar, karena selama 10 menit ari-ari tersebut juga tidak keluar terdakwa menelpon saksi DWI WAHYU PUTRI dengan mengatakan bahwa kandungannya telah gugur dan ari-arinya belum keluar, lalu dijawab oleh saksi DWI WAHYU PUTRI agar terdakwa menunggu nanti ari-arinya akan keluar sendiri, setelah terdakwa menunggu sampai 5 menit ari-ari juga belum keluar, terdakwa menelpon kembali saksi DWI WAHYU PUTRI dengan mengatakan bahwa ari-arinya belum keluar, tetapi saksi DWI WAHYU PUTRI menjawabnya dan meminta terdakwa agar menemui di rumah sakit Tegalyoso karena sedang piket, belum

sempat terdakwa pergi menemui saksi DWI WAHYU PUTRI di rumah sakit, janin yang semula diletakkan di tempat tidur telah meninggal dunia dan terdakwa membungkus janin tersebut dengan kaos dan ditaruhnya kembali di tempat tidur, dan terdakwa segera meninggalkannya untuk pergi ke RSU Tegalyoso tempat saksi DWI WAHYU PUTRI bertugas, kemudian oleh saksi DWI WAHYU PUTRI ari-ari tersebut berhasil dikeluarkan, selanjutnya setelah ari-ari berhasil dikeluarkan terdakwa sempat menelpon saksi MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI dengan mengatakan kalau kandungannya sudah keguguran sekitar jam 18.30 WIB dalam keadaan hidup namun setelah itu mati, selanjutnya terdakwa pun sempat meminta tolong untuk membantunya agar mengubur janinnya, namun saksi MUHAMMAD EFFENDI FAUQI ANNAS al BETI tidak menyanggupinya.

Sepulang dari rumah sakit terdakwa langsung memasukkan ari-ari ke dalam plastik dan dibungkus kaos menjadi satu dengan janin yang sudah terbungkus, kemudian terdakwa menaruhnya di dalam kardus dan diletakkan di tumpukan busa, keesokan harinya hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekitar jam 06.00 WIB, terdakwa menelpon temannya yang bernama TULUS NYADI dengan maksud agar mau membantu mencari tempat pemakaman janinnya, tetapi dijawab oleh temannya yang bernama TULUS NYADI agar terdakwa menunggu kabar berikutnya nanti akan ditelepon kembali, selanjutnya 1 jam kemudian terdakwa mendapat jawaban telepon bahwa ada tempat untuk memakamkan janin di Alas Kethu Wonogiri, selanjutnya atas jawaban tersebut terdakwa berjanji untuk bertemu di Alas Kethu, selanjutnya terdakwa segera mengambil janinnya yang sudah meninggal dan dimasukkan ke dalam kardus yang kemudian dibawa oleh terdakwa dengan sepeda motor menuju ke Alas Kethu, dan setelah bertemu dengan temannya yang bernama TULUS NYADI yang saat itu bersama dengan 2 orang laki-laki yang masing-masing baru diketahuinya bernama SUMARDI dan MARTOYO, selanjutnya mereka segera pergi ke pemakaman umum yang berada di sekitar Alas Kethu untuk menguburkan janin terdakwa, setelah selesai menguburkannya mereka berempat segera pergi ke rumah MARTOYO, namun sesampainya di rumah



MARTOYO mereka disuruh menemui Kadus EKO dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa ditanya tentang kebenaran telah memakamkan janin di pemakaman umum Alas Kethu dan terdakwa menjawabnya bahwa benar dirinya telah memakamkan janin di pemakaman umum Alas Kethu, namun beberapa saat kemudian beberapa anggota Polres Wonogiri datang dan mengusutnya dan setelah dimintai keterangan bahwa terdakwa telah mengakui dan membenarkan bahwa yang dikubur di pemakaman umum Alas Kethu adalah janin yang gugur dari hasil pengguguran kandungan, hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440 / 57 / 01 / 10 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hidayati dari Puskesmas Wonogiri II dengan hasil pemeriksaan keadaan mayat kaku, kepala tak ada kelainan, panjang badan 30 cm, berat  $\pm$  500 gram, anggota gerak atas dan bawah tak ada kelainan, alat kelamin laki-laki, dengan kesimpulan janin diperkirakan dalam usia kehamilan  $\pm$  24 minggu dan Visum Et Repertum No. YM.01.01 I 2010 661.16 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puska P,A, Sp OG dari RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten bahwa YUNITA ENDAH SETYOWATI dengan hasil pemeriksaan vulva/urethra tenang, serviks lunak, ova terbuka darah (+), corpus uteri membesar sekepala bayi, antefleksi parametrium kanan-kiri lemas dengan kesimpulan kelainan tersebut kemungkinan disebabkan akibat proses persalinan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### **4. Tuntutan**

Tuntutan dari penuntut umum pada pokoknya adalah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa YUNITA ENDAH SETYOWATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “MENYURUH ORANG LAIN UNTUK MENGGUGURKAN KANDUNGAN” sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 346 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA pada surat dakwaan kami.

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUNITA ENDAH SETYOWATI selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : satu buah gunting potong stainless dengan gagang berwarna hitam merk Gunindo, uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 dan satu butir pil Cytotec tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mencermati paparan kasus posisi, surat dakwaan serta surat tuntutan, selanjutnya peneliti akan menguraikan pembahasan sebagai berikut. Penyusunan konstruksi hukum suatu surat dakwaan yang baik adalah merupakan awal keberhasilan tugas penuntut umum dalam melakukan penuntutan, karena surat dakwaan menduduki posisi sentral dalam proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan. Dikatakan menduduki posisi sentral, karena surat dakwaan menjadi dasar dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian, dasar tuntutan pidana, dasar putusan pengadilan dan dasar dalam melancarkan upaya hukum. Mencermati paparan dakwaan dan tuntutan kasus perkara Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT dapat peneliti jabarkan konstruksi hukum yang disusun penuntut umum adalah sebagai berikut :

Sebelum membuat surat dakwaan yang perlu diperhatikan penuntut umum adalah menguasai hukum materiil terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara baik. Menguasai hukum materiil secara baik, termasuk juga mengenai dasar hukum yang tepat untuk menjerat perbuatan terdakwa.

Ketentuan mengenai tindak pidana aborsi dapat dijumpai dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya Pasal 299), Bab XIX Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346-349 KUHP). Selanjutnya, peraturan mengenai tindak

pidana aborsi dapat dijumpai pula dalam Pasal 15 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dengan mengetahui secara umum pengaturan tindak pidana aborsi dalam peraturan perundang-undangan, maka penuntut umum dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menentukan ketentuan hukum mana yang tepat untuk menjerat perbuatan aborsi yang dilakukan terdakwa. Pembuatan konstruksi hukum dakwaan dalam suatu perkara pidana menurut undang-undang harus segera dibuat setelah penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.

Dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan, penuntut umum yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana aborsi. Tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa adalah dengan sengaja menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan. Sehingga landasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengancam perbuatan aborsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah :

1. Pasal 346 KUHP yang berbunyi seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di mana dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan berbunyi :

- (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
- a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
  - b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
  - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
3. Kasus aborsi ini juga merupakan bentuk penyertaan, di mana tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Dalam penyertaan kualitas keikutsertaan terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh lakukan tindak pidana aborsi. Jadi perbuatan terdakwa dapat juga dikenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dengan ancaman pidana diperberat sepertiga dari pidana pokok.

Untuk menghindari gagalnya penuntutan, maka pembuatan konstruksi hukum surat dakwaan harus benar, tepat, dan sempurna. Untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat berikut :

#### 1. Syarat formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 (2) huruf a KUHP. Syarat formil adalah suatu syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa, yang meliputi :

- a. Diberi tanggal.
- b. Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi :
  - 1) nama lengkap,
  - 2) tempat lahir,
  - 3) umur atau tanggal lahir,
  - 4) jenis kelamin,
  - 5) kebangsaan,
  - 6) tempat tinggal,
  - 7) agama,

8) dan pekerjaan.

c. Ditandatangani oleh penuntut umum.

Bila tidak dipenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, maka tidak akan batal menurut hukum, namun ada alasan hakim untuk dapat membatalkan karena dipandang identitas terdakwa tidak jelas yang mungkin akan mengakibatkan timbulnya *error in persona* pada akhir keputusan pengadilan.

## 2. Syarat materiil

Syarat materiil adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Bila dalam membuat surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan syarat materiil tersebut maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan.

Mengingat pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan itu benar-benar telah terjadi dan penuntut umum yakin bahwa terdakwa yang bersalah, maka surat dakwaan perlu dibuat dengan bentuk tertentu, dengan tujuan jangan terjadi suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban hukum dalam masyarakat lepas dari tuntutan masyarakat. Bentuk dakwaan yang tepat digunakan tergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya. Menyusun surat dakwaan berhubungan dengan seni sehingga bagi setiap penuntut umum tidak sama. Akan tetapi, ada patokan-patokan (*standart operational procedure*) umum bagi setiap bentuk surat dakwaan yang harus dituruti dan dipenuhi. Berdasarkan bervariasinya bentuk tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka surat dakwaan juga berkembang mengikuti lajunya ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah berbentuk tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif dan kombinasi atau gabungan.

Bentuk dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan alternatif, yang pada hakekatnya hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dalam dakwaan bentuk alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Kata penghubung antara dakwaan satu dengan dakwaan yang lainnya menggunakan kata “atau”.

Dasar pertimbangan penuntut umum menyusun bentuk dakwaan alternatif adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

Perumusan atau penyusunan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Perumusan atau penyusunan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa untuk menuntut terdakwa. Maka dari itu, berdasarkan dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan yaitu atas inisiatif sendiri atau sengaja terdakwa melakukan tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi) dengan menyuruh orang lain membantu menggugurkan kandungannya. Tindakan aborsi dilakukan dengan alasan takut jika diketahui orang tuanya, malu jika diketahui teman-temannya, masih kuliah dan ditambah pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Tindak pidana aborsi terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 18.30 WIB dilakukan terdakwa di rumah kos terdakwa bertempat di Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Dilakukan dengan menyuruh orang lain untuk mencari orang yang dapat menggugurkan kandungannya. Kemudian Muhammad Effendi Fauqi Annas alias Beti bersama temannya yang bernama Lekso Sambodo alias Cokok mencari orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan yang

diketuinya bernama Dwi Wahyu Putri. Oleh Dwi Wahyu Putri terdakwa disuntik pada paha kanannya dan diberi 3 butir pil cytotec untuk diminum. Pil tersebut merupakan obat sakit perut, di mana apabila obat tersebut diminum oleh ibu hamil, maka rahim akan berkontraksi dan mulut rahim akan melunak atau membuka dengan demikian akan terjadi keguguran. Kegiatan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali. Biaya pengguguran kandungan tersebut sebesar Rp. 2.200.000,00. Dengan melakukan hal tersebut kandungan terdakwa gugur, di mana janin yang keluar masih dalam keadaan hidup dan terdengar tangisannya oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa janin tersebut ditaruh di tempat tidur dan terdakwa sempat mengambil gunting dengan maksud untuk memotong tali pusarnya dan terdakwa membungkus janin tersebut dengan kaos kemudian terdakwa menaruhnya di dalam kardus dan diletakkan di tumpukkan busa untuk keesokan harinya dimakamkan di pemakaman umum yang berada di sekitar Alas Kethu Wonogiri.

Dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan tersebut penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana aborsi yang dilakukan Yunita Endah Setyowati. Antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar. Sulitnya menentukan salah satu pasal diantara 2 atau 3 pasal yang saling berkaitan unsurnya menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan pilihan diantara 2 pasal atau lebih atas tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa.

Tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa dapat ditafsirkan melanggar ketentuan Pasal 346 KUHP karena tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 346 KUHP yaitu sengaja menggugurkan

atau mematikan kandungannya dengan menyuruh orang lain untuk itu. Selain itu, perbuatan terdakwa juga dapat ditafsirkan melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena juga memenuhi unsur-unsur ketentuan tersebut yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan “dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”. Tindakan medis tertentu hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli dan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Penuntut umum menambahkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyertaan. Kasus aborsi ini juga merupakan bentuk penyertaan, di mana tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam penyertaan kualitas keikutsertaan terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh lakukan tindak pidana aborsi.

Pertimbangan yang lain adalah untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Keraguan untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelaku. Seperti pada kasus perkara Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT dari hasil pemeriksaan penyidikan penuntut umum menentukan fakta yang kurang jelas yaitu apakah terdakwa melanggar ketentuan Pasal 346 KUHP atau ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka apabila terdakwa lolos dari dakwaan pertama dengan melanggar ketentuan Pasal 346 KUHP, terdakwa masih dapat dijerat dengan dakwaan kedua dengan melanggar ketentuan Pasal 80



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Alasan penuntut umum menetapkan Pasal 346 KUHP pada dakwaan pertama dan menetapkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan kedua terhadap perbuatan terdakwa adalah berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur yang terdapat yang terdapat dalam Pasal 346 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan penyidikan dan oleh karena penuntut umum membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif, penuntut umum memilih dakwaan yang paling benar dan terbukti yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 346 KUHP dengan alasan pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : “seorang wanita”

Yang dimaksud dengan seorang wanita adalah subyek hukum berupa orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam arti tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dan subyek hukum tersebut haruslah seorang wanita, jadi dengan demikian subyek hukum Pasal 346 KUHP haruslah seorang wanita yang mengandung, di depan persidangan terdakwa Yunita Endah Setyowati adalah seorang wanita yang telah mengandung atau hamil dengan usia kehamilan selama 24 minggu, telah mengakui sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan membenarkan identitas maupun materi yang dimaksud sebagaimana surat dakwaan yang telah penuntut umum bacakan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi Purbo Adi Wibowo, saksi Muhammad Effendi Fauqi Annas al Beti, saksi Lekso Sembodo al Cocok, dan saksi Dwi Wahyu Putri yang keterangannya satu sama lain telah mendukung dan membenarkan bahwa diri terdakwa adalah orang yang meminta tolong untuk menggugurkan kandungan yang berarti diri terdakwa telah hamil atau mengandung, keterangan mana apabila dihubungkan dengan keterangan

saksi Dwi Wahyu Putri, saksi Tulus Nyadi, saksi Iwan Purnama dan saksi Suharto yang kesemuanya pada intinya telah menerangkan telah terjadi peristiwa penggugurang kandungan, yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang telah membenarkan adanya peristiwa pengguguran kandungan dan terdakwa pun mengakui dan membenarkan bahwa dirinya adalah seorang wanita yang telah hamil yang kemudian pernah meminta tolong dan berhasil menggugurkan kandungan, dengan demikian terdakwa adalah pelaku yang telah menggugurkan kandungan, oleh karena itu ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “seorang wanita”, telah dapat dibuktikan.

## 2. Unsur : “yang sengaja”

Pengertian yang sengaja berdasarkan praktek peradilan dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui bahwa perbuatannya yang disadari itu dikehendaki dan ditujukan untuk tujuan mencapai suatu maksud tertentu, di dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa maksud tujuan yang dikehendaki oleh si pelakunya yaitu agar kandungan terdakwa Yunita Endah Setyowati yang sudah berusia 24 minggu dapat digugurkan karena terdakwa sendiri tidak menghendaki kehamilannya karena merasa malu dengan orang tua dan teman-temannya dan sekaligus menggnggu kuliahnya, oleh karena itu dengan adanya alasan tersebut terdakwa menginginkan untuk menggugurkan kandungan, sehingga dengan demikian pengguguran kandungan memang dikehendaki oleh terdakwa sendiri, fakta tersebut dapat diperoleh berdasarkan keterangan para saksi Purbo Adi Wibowo, saksi Muhammad Effendi Fauqi Annas al Beti, saksi Lekso Sembodo al Cocok, dan saksi Dwi Wahyu Putri, yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi ahli dr. H. Docang Ijptosiworo, MMR, SpOG, di mana pada prinsipnya terdakwa telah meminta tolong untuk mencarikan seorang yang dapat membantu menggugurkan kandungan dan setelah berhasil menemukan orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan, orang tersebut memberikan pil Cytotec yang menurut sifatnya akan dapat mempengaruhi kehamilan terdakwa, yang akhirnya dapat berakibat

gugurnya kandungan terdakwa yang sudah berusia 24 minggu, dari persesuaian keterangan para saksi ternyata telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa gugurnya kandungan memang sengaja dikehendaki oleh terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur “yang sengaja” telah dapat dibuktikan.

3. Unsur : “menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu”

Fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan bahwa terdakwa sengaja menghendaki kandungan yang ada pada dirinya menjadi gugur, maka untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa lebih dulu mencari informasi tentang ada tidaknya atau tersedia tidaknya membantu menggugurkan kandungan dan untuk mencari informasi tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi Purbo Adi Wibowo yang selanjutnya dapat mengenal saksi Muhammad Effendi Fauqi Annas al Beti dan saksi Lekso Sembodo al Cocok sebagai orang yang bersedia membantu memberikan sarana, keterangan dan kesempatan bagi terdakwa untuk melaksanakan niat dan kehendaknya yaitu mencari seseorang yang bersedia menggugurkan kandungan, yang dalam fakta tersebut nyata-nyata telah dilakukan oleh saksi Dwi Wahyu Putri dengan cara memberikan 3 buah pil Cytotec, yang akhirnya setelah terdakwa mengkonsumsi obat tersebut kandungan terdakwa dapat digugurkan, hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440 / 57 / 01 / 10 tanggal 15 Januari 2010 dan Visum Et Repertum No. YM.01.01 I 2010 661.16 tanggal 27 Januari 2010, demikian pula dengan kesaksian ahli dr. H. Docang Ijptosiworo, MMR, SpOG, pemberian 3 buah pil dari saksi Dwi Wahyu Putri kepada terdakwa yang dalam keadaan hamil akan mengakibatkan kehamilannya menjadi gugur, dari fakta tersebut ternyata diakui baik oleh saksi Dwi Wahyu Putri maupun oleh terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur “menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu” telah dapat dibuktikan.

Setelah selesainya pembuatan konstruksi hukum surat dakwaan secara benar, tepat, dan sempurna, surat dakwaan dapat diajukan ke sidang pengadilan untuk dilakukan pembuktian. Selanjutnya setelah berlangsungnya persidangan

dengan berbagai kegiatan dalam proses pembuktian, yakni memeriksa semua alat bukti, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum, maka ketua majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan selesai. Kemudian ketua majelis hakim meminta kepada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan yang akan dibacakan dalam sidang mendatang yang telah ditetapkan waktunya.

Pembuatan konstruksi hukum surat tuntutan didasarkan pada surat dakwaan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan kemudian menganalisa hukum terhadap fakta-fakta tersebut. Mencermati kasus perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT perbuatan terdakwa adalah termasuk tindak pidana berat karena dikualifikasikan dalam kejahatan terhadap nyawa. Ancaman untuk tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi) dapat diancam pidana penjara pada dakwaan pertama menurut ketentuan Pasal 346 KUHP paling lama 4 (empat) tahun pidana penjara atau dakwaan kedua menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan paling lama 15 (lima belas) tahun pidana penjara dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Namun penuntut umum menuntut terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Hal yang dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam penuntutan perkara Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT adalah :

1. Terdakwa adalah korban dari laki-laki yang tak bertanggung jawab. Terdakwa hamil diluar nikah sebagai akibat pergaulan bebas maupun bujuk rayu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dengan kehamilannya terdakwa menjadi bingung dan malu bila kehamilannya di luar nikah diketahui oleh teman-temannya maupun oleh orang tuanya sehingga terdakwa mencari jalan pintas untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 24 minggu dengan mencari seseorang yang dapat menolong dirinya, baik memberikan informasi tentang orang yang bersedia membantu

menggugurkan kandungan atau orang yang secara langsung dapat menggugurkan kandungannya.

2. Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan masa depannya.
3. Dalam proses penyidikan terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berkaitan dengan tuntutan penuntut umum dalam perkara Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT setelah mengetahui fakta-fakta yang terungkap yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka perbuatan terdakwa Yunita Endah Setyowati telah sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 346 KUHP “melakukan tindak pidana menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan, sebagaimana pada dakwaan pertama dalam surat dakwaan penuntut umum. Selanjutnya berdasarkan pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Yunita Endah Setyowati, oleh karena dakwaan penuntut umum dibuat secara alternatif maka penuntut umum memilih dakwaan yang dianggap paling benar dan terbukti yaitu dakwaan pertama dengan melanggar Pasal 346 KUHP yang semua unsurnya dapat dibuktikan di sidang pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan penuntut umum tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang menyatakan terdakwa Yunita Endah Setyowati telah terbukti bersalah melakukan “tindak pidana menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama pada surat dakwaan penuntut umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yunita Endah Setyowati selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**B. Implikasi Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Sebagai Akibat  
Konstruksi Hukum Dakwaan yang Disusun Oleh Penuntut Umum  
Berkenaan dengan Penuntutan Perkara Aborsi Nomor :  
42/PID.B/2010/PN.KLT**

Mengkaji mengenai implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana sebagai akibat konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum berkenaan dengan penuntutan perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT, harus dilihat ancaman pasal yang didakwakan dan tuntutan penuntut umum maupun putusan yang dijatuhkan hakim. Implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana akan diketahui ketika membandingkan ketiga dokumen yakni surat dakwaan, surat tuntutan dan putusan pengadilan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana sebagai akibat konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum berkenaan dengan penuntutan perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KL, berikut ini adalah hasil penelitian terhadap ketiga dokumen yang dimaksud :

Tabel 2. Dakwaan, Tuntutan dan Putusan

a.	Dakwaan	<p>1) Dakwaan pertama :</p> <p>Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 346 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p> <p><b>ATAU</b></p> <p>2) Dakwaan kedua :</p> <p>Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
----	---------	--

b.	Tuntutan	<p>1) Menyatakan terdakwa YUNITA ENDAH SETYOWATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “MENYURUH ORANG LAIN UNTUK MENGGUGURKAN KANDUNGAN” yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA pada surat dakwaan kami.</p> <p>2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUNITA ENDAH SETYOWATI selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3) Menyatakan barang bukti berupa : satu buah gunting potong stainless dengan gagang berwarna hitam merk Gunindo, uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 dan satu butir pil Cytotec tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>
c.	Putusan	<p>1) Menyatakan terdakwa YUNITA ENDAH SETYOWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYURUH ORANG LAIN UNTUK MENGGUGURKAN KANDUNGAN” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.</p> <p>2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa YUNITA ENDAH SETYOWATI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.</p> <p>3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5) Menetapkan agar barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) buah gunting potong Stainless dengan gagang berwarna hitam merk Gunindo, uang tunai sebesar Rp.</p>

		500.000,00 dan satu butir pil Cytotec tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain.
		6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tindakan aborsi dilarang untuk dilakukan tanpa kecuali, baik terhadap aborsi yang dilakukan berdasarkan alasan atau pertimbangan medis (*abortus provocatus medicinalis*) atau aborsi yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku (*abortus provocatus criminalis*) pun dilarang. Karena anak yang rnasih dalam kandungan merupakan subyek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sanksi hukum yang diterapkan bagi pelaku aborsi bermacam-macam, mulai dari hukuman penjara hingga hukuman denda. Pidana penjara menggunakan sistem pidana maksimal bukan minimal, sehingga seringkali dalam prakteknya vonis pengadilan sangat ringan dibanding sanksi hukuman yang ada dalam ketentuan KUHP. Mengenai hukuman denda, KUHP tidak memberlakukan ketentuan hukum denda bagi pelaku aborsi, akan tetapi lebih lanjut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menerapkan denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Ancaman untuk tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi) berat dengan ancaman pidana penjara pada dakwaan pertama menurut ketentuan Pasal 346 KUHP paling lama 4 (empat) tahun pidana penjara atau dakwaan kedua menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan paling lama 15 (lima belas) tahun pidana penjara dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun penuntut umum menuntut terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Hal yang dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam penuntutan perkara Nomor : 42/Pid.B/2010/PN.KLT adalah :



1. Terdakwa adalah korban dari laki-laki yang tak bertanggung jawab. Terdakwa hamil diluar nikah sebagai akibat pergaulan bebas maupun bujuk rayu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dengan kehamilannya terdakwa menjadi bingung dan malu bila kehamilannya di luar nikah diketahui oleh teman-temannya maupun oleh orang tuanya sehingga terdakwa mencari jalan pintas untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 24 minggu dengan mencari seseorang yang dapat menolong dirinya, baik memberikan informasi tentang orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan atau orang yang secara langsung dapat menggugurkan kandungannya.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan masa depannya.
3. Dalam proses penyidikan terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berkaitan dengan tuntutan penuntut umum dalam perkara Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT setelah mengetahui fakta-fakta yang terungkap yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka perbuatan terdakwa Yunita Endah Setyowati telah sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 346 KUHP “melakukan tindak pidana menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan, sebagaimana pada dakwaan pertama dalam surat dakwaan penuntut umum. Selanjutnya berdasarkan pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Yunita Endah Setyowati, oleh karena dakwaan penuntut umum dibuat secara alternatif maka penuntut umum memilih dakwaan yang dianggap paling benar dan terbukti yaitu dakwaan pertama dengan melanggar Pasal 346 KUHP yang semua unsurnya dapat dibuktikan.

Berdasarkan pertimbangan penuntut umum tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang menyatakan terdakwa Yunita Endah Setyowati telah terbukti bersalah melakukan “tindak pidana menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 346 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama pada surat dakwaan penuntut umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yunita Endah Setyowati selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Surat dakwaan berbentuk alternatif dapat memberikan pilihan atau kelonggaran kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim berkaitan dengan dakwaan alternatif penuntut umum, pembuktian tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, jika dakwaan pertama terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan. Jika dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan yang kedua dengan ketentuan, membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama yang tidak terbukti. Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan, untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*) dan memberikan pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat.

Terpenuhinya semua unsur dakwaan pertama penuntut umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 346 KUHP tentang tindak pidana yang dilakukan seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. Dengan terbuktinya dakwaan pertama ini, maka dakwaan kedua penuntut umum tidak perlu dibuktikan hakim.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka majelis hakim berketetapan untuk menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pada dakwaan yang terbukti di persidangan berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan. Sehingga putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 8 (delapan)

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Pertimbangan hakim dalam unsur pasal tindak pidana menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan perbuatan telah sesuai dengan tuntutan penuntut umum yakni berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi) dengan menyuruh orang lain membantu menggugurkan kandungannya. Selanjutnya untuk melancarkan niatnya, terdakwa terlebih dahulu mencari seseorang yang dapat menolong dirinya baik memberikan informasi tentang orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan atau orang yang secara langsung dapat menggugurkan kandungannya. Upaya korban membuahkan hasil dengan menemukan perantara untuk mencarikan orang yang dapat membantu menggugurkan kandungan yaitu Muhammad Effendi Fauqi Annas alias Beti dan Cocok, serta dari kedua perantara itu menemukan orang yang dapat membantu menggugurkan kandungan yaitu Dwi Wahyu Putri.

Meskipun terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP, akan tetapi dalam kenyataannya hakim hanya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Hal ini terjadi karena :

1. Putusan ini didasarkan pada dakwaan penuntut umum surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Dakwaan penuntut umum sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan, dasar keputusan yang akan dijatuhkan, dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.

2. Putusan ini didasarkan pada tuntutan penuntut umum yaitu selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Terdakwa memberikan keterangan di Persidangan dengan jujur mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
5. Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan masa depannya.
6. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dengan demikian putusan pengadilan terhadap perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT relatif sinkron atau tidak terpaut jauh dengan dakwaan maupun tuntutan penuntut umum. Dengan mengacu pada tuntutan penuntut umum dengan ancaman pidana ringan untuk tindak pidana aborsi dengan sengaja menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan, maka juga akan menghasilkan vonis ringan oleh hakim. Tetapi bukankah keputusan tersebut melanggar perintah undang-undang yang menentukan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun menurut Pasal 346 KUHP dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Menurut penulis putusan pengadilan dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dirasa sangat ringan mengingat tindak pidana aborsi merupakan kejahatan terhadap nyawa seseorang, paling tidak perbuatan terdakwa dapat diancam dengan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun atau dapat juga digunakan penjatuhan pidana maksimal.

Mencermati proses penegakan hukum dalam kasus perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT dikaitkan dengan tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu kasus atau perkara pidana yang menyimpang dalam masyarakat. Kebenaran materiil mengenai *tempus delicti* tindak pidana aborsi yang

dilakukan terdakwa dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana aborsi dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 18.30 WIB. Hal ini didasarkan pada keterangan terdakwa yaitu “benar, setelah disuntik dan diberi obat sebanyak tiga kali kandungan terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 18.30 WIB gugur, nampak jenis kelamin laki-laki dan saat itu masih hidup”. *Locus delictie* yang dilakukan terdakwa bertempat di rumah kos terdakwa tepatnya di Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten telah memenuhi kebenaran materiil atas dasar “setelah disuntik dan diberi obat sebanyak tiga kali terdakwa kembali ke tempat kosnya dan menunggu sampai 24 jam yaitu hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 18.30 WIB gugur, nampak jenis kelamin laki-laki dan saat itu masih hidup”.

*Modus operandi* tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam pengguguran kandungan (aborsi) terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 18.30 WIB dilakukan terdakwa di rumah kos terdakwa tepatnya di Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Dilakukan dengan menyuruh orang lain untuk mencari orang yang dapat menggugurkan kandungannya. Kemudian Muhammad Effendi Fauqi Annas alias Beti bersama temannya yang bernama Lekso Sambodo alias Cokok mencari orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan yang diketahuinya bernama Dwi Wahyu Putri. Oleh Dwi Wahyu Putri terdakwa disuntik pada paha kanannya dan diberi 3 buah butir pil cytotec untuk diminum. Pil tersebut merupakan obat sakit perut, di mana apabila obat tersebut diminum oleh ibu hamil, maka rahim akan berkontraksi dan mulut rahim akan melunak atau membuka dengan demikian akan terjadi keguguran. Kegiatan tersebut dilakukan dua kali. Dengan melakukan hal tersebut kandungan terdakwa gugur, di mana janin yang keluar masih dalam keadaan hidup dan terdengar tangisannya oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa janin tersebut ditaruh di tempat tidur dan terdakwa sempat mengambil gunting dengan maksud untuk memotong tali pusarnya dan terdakwa membungkus janin tersebut dengan kaos kemudian terdakwa menaruhnya di dalam kardus

dan diletakkan di tumpukkan busa untuk keesokan harinya dimakamkan di pemakaman umum yang berada di sekitar Alas Kethu Wonogiri.

Kebenaran materiil mengenai barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana aborsi yaitu berupa 1 (satu) buah gunting potong Stainless dengan gagang berwarna hitam merk Gunindo, uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 dan 1 (satu) butir pil Cytotec telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan kebenaran materiil. Hal ini berdasarkan pada penuntut umum telah memperlihatkan semua barang bukti tersebut kepada para saksi maupun korban, selanjutnya oleh yang bersangkutan telah membenarkan. Karena dari itu barang bukti dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Setelah dipenuhinya tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya terhadap *tempus delicti*, *locus delictie*, *modus operandi* dan barang bukti dalam penuntutan, penuntut umum mempertimbangkan keadilan yang di terima korban atau terdakwa pada kasus perkara aborsi Nomor : 42/PidID.B/2010/PN.KLT. Dengan melihat latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana aborsi yaitu terdakwa adalah korban dari laki-laki yang tak bertanggung jawab. Terdakwa hamil diluar nikah sebagai akibat pergaulan bebas maupun bujuk rayu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dengan kehamilannya terdakwa menjadi bingung dan malu bila kehamilannya di luar nikah diketahui oleh teman-temannya maupun oleh orang tuanya sehingga terdakwa mencari jalan pintas untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 24 minggu dengan mencari seseorang yang dapat menolong dirinya, baik memberikan informasi tentang orang yang bersedia membantu menggugurkan kandungan atau orang yang secara langsung dapat menggugurkan kandungannya. Menurut penulis perbuatan aborsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dilarang untuk dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup. Selain itu tindakan aborsi

dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman yang berat.

Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana aborsi tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan aborsi terdakwa. Hal ini dikarenakan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa termasuk kejahatan berat dan penuntutan maupun putusan dapat dilakukan dengan penjatuhan pidana maksimal. Penjatuhan pidana maksimal ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana aborsi.

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu pembalasan, pembinaan dan gabungan antara pembalasan dan pembinaan. Pada perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT dengan dilakukan penjatuhan pidana minimal yang diputuskan hakim yaitu 5 (lima) bulan penjara menurut ketentuan Pasal 346 KUHP yang menginginkan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun kurang dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan akan hanya terwujud tujuan pemidanaan pembinaan. Menurut penulis penjatuhan pidana maksimal (paling tidak 1 tahun pidana penjara) akan dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan akan terwujud tujuan pemidanaan pembalasan dan pembinaan. Selain itu dapat juga digunakan sebagai sarana untuk menyadarkan terdakwa atas apa yang telah diperbuat serta menyadarkan bagi siapapun juga agar tidak melakukan tindak pidana aborsi.

## **BAB IV. PENUTUP**

Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada akhir penulisan hukum ini penulis akan menyampaikan simpulan dan saran. Dalam simpulan dan saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasar hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam penuntutan perkara aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT dan implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana, dapat ditarik kesimpulan :

#### **1. Konstruksi Hukum yang Disusun Oleh Penuntut Umum dalam Penuntutan Perkara Aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT**

Konstruksi hukum dakwaan yang disusun penuntut umum pada kasus perkara aborsi merupakan bentuk dakwaan alternatif. Dasar pertimbangan penuntut umum menyusun bentuk dakwaan alternatif adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan tersebut penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana aborsi yang dilakukan Yunita Endah Setyowati. Antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar. Sulitnya menentukan salah satu pasal diantara 2 atau 3 pasal yang saling berkaitan unsurnya menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan pilihan diantara 2 pasal atau lebih atas tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa.



- b. Pertimbangan yang lain adalah untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Keraguan untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelaku. Seperti pada kasus perkara Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT dari hasil pemeriksaan penyidikan penuntut umum menentukan fakta yang kurang jelas yaitu apakah terdakwa melanggar ketentuan Pasal 346 KUHP atau ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka apabila terdakwa lolos dari dakwaan pertama dengan melanggar ketentuan Pasal 346 KUHP, terdakwa masih dapat dijerat dengan dakwaan kedua dengan melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan penuntut umum didasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dengan bentuk alternatif yaitu dengan memilih dakwaan yang dianggap paling benar dan terbukti yaitu dakwaan pertama dengan melanggar Pasal 346 KUHP yang semua unsurnya dapat dibuktikan di sidang pengadilan.

Penuntut umum tidak menuntut dengan pidana maksimal dari ketentuan Pasal 346 KUHP yang menginginkan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, melainkan hanya menuntut 8 (delapan) tahun pidana penjara karena berdasar pada pertimbangan :

- a. Terdakwa adalah korban dari laki-laki yang tak bertanggung jawab. Terdakwa hamil diluar nikah sebagai akibat pergaulan bebas maupun bujuk rayu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dengan kehamilannya terdakwa menjadi bingung dan malu bila kehamilannya di luar nikah diketahui oleh teman-temannya maupun oleh orang tuanya sehingga terdakwa mencari jalan pintas untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 24 minggu dengan mencari seseorang yang dapat menolong dirinya, baik memberikan informasi tentang orang yang bersedia membantu

menggugurkan kandungan atau orang yang secara langsung dapat menggugurkan kandungannya.

- b. Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan masa depannya.
- c. Dalam proses penyidikan terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal tersebut maka penuntut umum menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunita Endah Setyowati dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Berdasar pada dakwaan berbentuk alternatif akan dapat memberikan pilihan atau kelonggaran kepada penuntut umum dalam hal penuntutan dan hakim dalam hal mengambil putusan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa.

## 2. Implikasi Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Sebagai Akibat Konstruksi Hukum Dakwaan yang Disusun Oleh Penuntut Umum Berkenaan dengan Penuntutan Perkara Aborsi Nomor : 42/PID.B/2010/PN.KLT

Implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana sebagai akibat konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum berkenaan dengan penuntutan perkara aborsi Nomor: 42/PID.B/2010/PN.KLT adalah relatif sinkron atau tidak terpaut jauh dengan dakwaan maupun tuntutan penuntut umum. Dengan mengacu pada dakwaan dan tuntutan penuntut umum dengan ancaman pidana ringan untuk tindak pidana aborsi dengan sengaja menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan, maka juga akan menghasilkan vonis ringan oleh hakim.

Upaya penegakan hukum pada kasus perkara aborsi Nomor: 42/PID.B/2010/PN.KLT mengabaikan unsur keadilan karena faktor latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana aborsi tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan aborsi terdakwa. Hal ini

dikarenakan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa termasuk kejahatan berat dan penuntutan maupun putusan dapat dilakukan dengan penjatuhan pidana maksimal. Penjatuhan pidana maksimal ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana aborsi

### **B. Saran**

1. Perlunya pelatihan tentang proses penuntutan yang harus dilakukan oleh penuntut umum pada kasus tindak pidana aborsi. Mengingat pengguguran kandungan (aborsi) banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, karena disebabkan para penegak hukum khususnya penuntut umum masih menemui kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia.
2. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum merupakan upaya penegakan hukum yang harus berdasarkan tiga unsur yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) penuntutan tindak pidana. Dengan hal ini, tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dapat terwujud, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari kasus atau perkara pidana aborsi. Karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan hak hidup seseorang dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Dalam hukum pidana di Indonesia perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP.
3. Perlu adanya peranan pemerintah untuk aktif dalam hal mengantisipasi mengenai kehamilan yang tidak dikehendaki dengan cara penancangan program sosialisasi yang masiv (berkelanjutan atau terus menerus) mengenai :
  - a. Kesadaran terhadap kesehatan perempuan.

- b. Bahaya dilakukannya aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi yang tak terduga dan bahkan dapat menyebabkan kematian.
  - c. Mengurangi tingkat angka aborsi dengan cara menampung anak yang tidak dikehendaki di dalam satu badan yayasan sosial.
  - d. Peningkatan peraturan dan pengawasan di lingkungan kos.
  - e. Peningkatan upaya penegakan hukum dengan menindak tegas terhadap tindak pidana aborsi sehingga menimbulkan efek jera.
4. Perlu adanya peranan orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan menanamkan pendidikan agama sebagai dasar pergaulan hidup, memberi pendidikan moral dan perilaku yang baik serta melakukan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. *Abortus Dalam Kaitannya Dengan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*.  
<http://ningrumwahyuni.wordpress.com/2009/11/22/abortus-dalam-kaitannya-dengan-ilmu-kedokteran-forensik-dan-medikolegal>. Diakses pada tanggal 17 April 2010 pukul 17:21 WIB.
- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Harun M. Husein dan Hamrat Hamid. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Hesti Armiwulan. 2000. *Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum*.  
<http://ceria.bkkbn.go.id/referensi/substansi/detail/94>. Diakses pada tanggal 02 April 2010 pukul 23:18 WIB.
- K. Bertens. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lukman Hakim Nainggolan. 2006. *Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Equality. Vol. 40, No. 2.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sudikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharto. 2004. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryono Ekotama, St. Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.